

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Arslan, R., Latif, A. S., Ramdani, C. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 348–368.
- Artiwi, L. P. P. I., & Wahyuni, M. A. (2024). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng Luh*. 992–1002.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Digdowiseiso, K., Yolandasari, P., & Khairi, M. (2023). *Analisis Piggyback Tax Dalam Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Nusa Tenggara Barat*. 4(1), 157–166.
- Galib Lahada. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pada. *Administratie*, 8.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Handayani, R. (2025). *Awal Tahun Pemprov Bali Berikan Diskon Pajak Kendaraan, Ini Rinciannya!* Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/awal-tahun-pemprov-bali-berikan-diskon-pajak-kendaraan-ini-rinciannya/>
- Hilmiyah, F., Tiara Maretaniandini, S., & Aura Tsabita, Z. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 123–138. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8573>
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *Jesya*, 7(2), 1958–1970. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1741>

- Maharani, A., & Munawaroh. (2025). *Pajak Kendaraan Bermotor : Persepsi Wajib Pajak terhadap Pelayanan di SAMSAT Kabupaten Serang*. 3, 176–185.
- Maharani, K., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 513–524. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61207>
- Mandala Yuda, M. T., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(01), 189–199. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.48998>
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. 2(2009), 1–15.
- Ndalu, M. S. A., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 193–204. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1 (2024). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/29244>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 30 (2024). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/29328#:~:text=Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 9 (2021). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/28691#:~:text=Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor>
- Putra Yasa, I. N., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 66–87. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.16653>
- Rat. (2025). *Ada Opsen PKB, Pajak Kendaraan yang Dibayar Warga Bali Lebih Mahal?* NusaBali.Com. <https://www.nusabali.com/berita/183859/ada-opsen-pkb-pajak-kendaraan-yang-dibayar-warga-bali-lebih-mahal/halaman/1>

- Sasalbillah, I. N. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–19.
- Siallangan, T., & Pohan, C. A. (2022). *Analisis Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021*. 2(5), 543–551.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>
- Thalib, A. W., Tuli, H., & Taruh, V. (2023). Pengaruh Faktor Demografi dan Insentif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Samsat Kota Gorontalo). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 112–124.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.